



**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA SENSUS PENDUDUK ONLINE**

**DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

oleh

**DWI PRAYUDA**

NPM. 21801091041



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2024**

## RINGKASAN

Dwi Prayuda, 2024, NPM 21801091041, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi **Penerapan *E-Government* Pada Sensus Penduduk Online di Badan Pusat Statistik**. Dosen Pembimbing I Dr. Khoiron, S.AP., M.IP Dosen Pembimbing II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

---

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran penting untuk menyelenggarakan kegiatan statistik berupa sensus dan survei. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Batu merupakan wujud inovasi dalam penerapan *E-Government*. Pada website [sensus.bps.go.id](http://sensus.bps.go.id), sebagian masyarakat mengeluhkan beberapa hambatan yang dihadapi saat hendak mengisi Sensus Penduduk Online seperti terjadi kesalahan saat memasukan nomor KK dan NIK maupun nomor KK dan NIK yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian antara nomor KK penduduk dengan database BPS yang diterima dari Dirjen Dukcapil menyebabkan masyarakat tidak bisa masuk login ke sistem Sensus Penduduk Online tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Sensus Penduduk Online. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan instrument yaitu: interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, setelah data dikelola dan selanjutnya analisis dengan cara berfikir deduktif, yaitu menganalisis data umum untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih kurangnya *support* pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih kurangnya sumber daya manusianya yang berpartisipasi dalam mengakses Sensus Penduduk dan keterbatasan pada anggaran yang harus diperhatikan pemerintah BPS Kota Batu. Dari segi *value* yang didapat setelah menerapkan Sensus Penduduk Online bagi BPS adalah pengumpulan data Sensus menjadi lebih efektif karena tanpa proses pencacahan.

**Kata Kunci : Sensus Penduduk Online, *E-Government***

## SUMMARY

Dwi Prayuda, 2024, NPM 21801091041, *Study Program of public Administration Faculty of Administrative Science, Application of E-Government in the Online Population Census at the Central Statistics Agency*. Advisor : I Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, Advisor : II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

*The Central Statistics Agency (BPS) is a non-ministerial government institution that has an important role in carrying out statistical activities in the form of censuses and surveys. As stated in Law no. 16 of 1997 concerning Statistics. The implementation of the 2020 Population Census which was carried out simultaneously throughout Indonesia, including in Batu City, is a form of innovation in the application of E-Government. On the census.bps.go.id website, some people complained about several obstacles they faced when filling out the Online Population Census, such as errors occurring when entering the KK and NIK numbers or KK and NIK numbers that did not match. The mismatch between the population's family card number and the BPS database received from the Director General of Dukcapil means that people cannot log in to the Online Population Census system.*

*The aim of this research is to find out how E-Government is implemented in the Online Population Census at BPS Batu City and to find out the supporting and inhibiting factors in the Online Population Census. The type of research used is descriptive research using a qualitative approach. The data collection method uses instruments, namely: interview, observation, and documentation. The data analysis method uses qualitative methods, after the data is managed and then analyzed using deductive thinking, namely analyzing general data to obtain new knowledge conclusions that are more specific.*

*Based on the research results, it shows that the implementation of e-Government in the Online Population Census at BPS Batu City cannot be said to be successful. This is due, among other things, to the lack of government support in the form of regulations and outreach to the community. Then add to this the lack of human resources participating in accessing the Population Census and budget limitations that the Batu City BPS government must pay attention to. In terms of value obtained after implementing the Online Population Census for BPS, the collection of Census data becomes more effective because it does not involve an enumeration process.*

**Keywords:** *Online Population Census, E-Government*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam beberapa dekade terakhir teknologi, informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesatnya (Hariningsih, 2005; 5). Transformasi global yang terjadi berpengaruh pada pranata sosial dan mengubah nilai-nilai yang bergeser karena fleksibilitas dan kemampuan teknologi untuk memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudahan dalam berinteraksi nyaris tidak ada lagi batas ruang jarak dan waktu bisa dimana saja dan kapan saja sehingga arus informasi menjadi sangat cepat dan komunikasi menjadi tanpa batas. Dengan adanya teknologi yang begitu masif seakan mengarah pada kemajuan dan pengembangan teknologi sekaligus menjadi tantangan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Seiring perkembangan teknologi informasi semakin mendorong upaya upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Dimana kemampuan teknologi dalam mengubah cara pemerintah beroperasi semakin diakui. Proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan instansi pemerintah dapat berlangsung secara lebih cepat dan mudah. Akibat dari perkembangan tersebut telah membawa perubahan dari pelayanan manual menuju elektronik, pemerintahan konvensional yang terkenal dengan paper based administration perlahan kini mulai ditinggalkan.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi menghasilkan konsep baru yang disebut *electronic government* (Indrajit, 2016; 4).

Pemerintah di Indonesia sejak tahun 2003 telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dengan kondisi penerapannya yang beragam. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pemerintahan. Hal ini mendorong setiap pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk melaksanakan pengembangan *E-Government* secara nasional sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing.

*E-Government* adalah pengaplikasian berbasis internet yang dirancang untuk mengatasi kepentingan di era digital saat ini. *E-Government* dikelola oleh pemerintah dalam menawarkan layanan secara online yang menjalin hubungan antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan pelaku bisnis (G2B), serta pemerintah dengan masyarakat sipil (G2C). Pelaksanaan *E-Government* yang biasanya dilakukan dan mudah pelaksanaannya adalah dengan membuat situs web pemerintah. Situs web ini berfungsi sebagai strategi untuk mengembangkan konsep *E-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dengan demikian konsep *E-Government* yang diusung oleh pemerintah yang berfokus pada pelayanan sektor publik diharapkan dapat terwujud sepenuhnya, karena semua layanan bisa diakses melalui jaringan internet selama 24 jam



Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran penting untuk menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus dan survei. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang menyebutkan sensus adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada waktu tertentu. Pengumpulan data dengan metode sensus meliputi tiga bagian yaitu, Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun-tahun berakhiran angka 0 (Nol), Sensus Pertanian dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 3 (tiga) dan Sensus Ekonomi dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran angka 6 (enam).

Sensus Penduduk sudah dilakukan sebanyak tujuh kali setelah Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan yang terakhir tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, petugas mengunjungi setiap rumah ke rumah untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat untuk diwawancarai. Sebagai salah satu sumber data kependudukan sensus penting dilakukan guna menyediakan data dasar kependudukan yang dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pemerintah melalui BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk dengan metode yang berbeda dari sebelumnya. Sensus Penduduk digelar secara online di BPS seluruh Indonesia tidak terkecuali di BPS Kota Batu. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Dr. Muchammad Romzi mengatakan :

“BPS telah menyiapkan diri sejak 2018 untuk pengembangan aplikasi Sensus Penduduk Online yang dibantu oleh BPS Australia (Australian Bureau of Statistic). Sensus Penduduk Online tersebut menggunakan platform yang bernama *Integrated Collection System* (ICS). Platform ini dirancang untuk pengumpulan data multimetode, terutama untuk survei secara umum di Badan Pusat Statistik. karena berbasis registrasi, ICS harus disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia” (Kominfo.go.id, 2018)

BPS sejak 2018 mengembangkan aplikasi Sensus Penduduk yang dibantu BPS Australia menghasilkan aplikasi bernama ICS berbasis website. Website ini kemudian menjadi domain untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang memuat tentang pertanyaan mengenai informasi kependudukan. jenis informasi yang disediakan oleh pemerintah BPS Kota Batu berupa situs web yang menyajikan data satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan utama dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 secara online adalah untuk mengajak sebanyak mungkin penduduk untuk memperbarui datanya sendiri secara online melalui website <http://sensus.bps.go.id>

Pada website [sensus.bps.go.id](http://sensus.bps.go.id), sebagian masyarakat mengeluhkan beberapa hambatan yang dihadapi saat hendak mengisi Sensus Penduduk Online seperti terjadi kesalahan saat memasukan nomor KK dan NIK maupun nomor KK dan NIK yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian antara nomor KK penduduk dengan database BPS yang diterima dari Dirjen Dukcapil menyebabkan masyarakat tidak bisa masuk login ke sistem Sensus Penduduk Online tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Kuranya sosialiasi mengenai pentingnya dan tata cara bagaimana pengisian sensus online juga menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengisian sensus online. Selain itu, banyak juga kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti kebocoran data BPJS Kesehatan. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir akan keamanan data pribadinya, Banyak pihak yang pesimis terhadap keamanan data yang diberikan, permasalahan keamanan data menjadi salah satu permasalahan utama di tengah masifnya transaksi berbasis *online* yang mencantumkan identitas setiap pengguna.

Gambar 1.1 Perolehan Hasil Sensus Penduduk Online



Sumber : Data Sekunder Peneliti

Berdasarkan pernyataan dari Kepala BPS Kota Batu Parjan, bahwasanya Sensus Penduduk Online telah diikuti oleh 69 ribu masyarakat Kota Batu. Jumlah tersebut sebenarnya masih dibawah target BPS. Lembaga statistik ini menargetkan 50 persen dari keseluruhan masyarakat Kota Batu bisa mengisikan data pribadinya melalui sensus online. Diketahui masyarakat Kota Batu yang sudah berpartisipasi



pada pengisian sensus online hanya mencapai 30 persen saja. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk mencatat penduduk kota batu pada bulan september 2020 sebesar 213.046 jiwa dengan rincian 105.745 perempuan dan 107.301 laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2020)

Selama ini, kajian tentang *E-Government* telah berkembang pesat dan telah mencakup berbagai sub topik yang berbeda seperti pembahasan mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapan *E-Government* serta faktor penghambat *E-Government*, pembahasan tentang konsep *E-Government* di Kota Batu sebelumnya sudah ada beberapa yang meneliti, Hal itu yang menjadi dasar tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisa penelitian ini. Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama.* Salwa dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan *E-Government* untuk mewujudkan Transparansi Informasi Publik di Kota Batu” tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ini ingin mengetahui upaya Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan *E-Government* khususnya dalam memperluas kerjasama daerah dalam mendukung terwujudnya smart city di Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *E-Government* di Kota Batu didukung Peraturan Walikota Nomor 78 tahun 2017 tentang Master Plan Batu Smart city. Sehingga tercipta berbagai aplikasi yang dibuat untuk membantu berjalanya smart city, diantaranya yaitu : Among Tani, Among Kota, dan Among Warga.

*Kedua.* Sihidi (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Smart City Melalui Batu Among Tani Teknologi (BATT) di Kota Batu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan BATT di Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan Program BATT yang diciptakan sejak 2017 dan dilaksanakan hingga Desember 2019 belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena kapasitas server terbatas sehingga sering mengalami gangguan dan manfaat pelayanan yang diberikan kurang optimal. Selain itu masalah lain berkaitan dengan sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan kesiapan birokrasi yang kurang mendukung.

*Ketiga.* Darma (2020), penelitian terdahulu yang berjudul ‘Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) dalam Pelayanan Publik di Desa Junrejo Kota Batu’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan penggunaan SIMADE dalam pelayanan publik. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SIMADE di Desa Junrejo tidak bisa dikatakan efektif diterapkan. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan dalam sistemnya sendiri yang berakibat kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah Desa Junrejo.

*Keempat.* Fadhlurrahman (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan *E-Government* di Pemerintah Kota Batu menggunakan kerangka kerja pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGi)”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi implemenetasi *E-Government* di Pemerintah Kota Batu melalui studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dan Dinas Pertanian Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI). Implementasi *E-Government* di Dinas Kominfo, Bapelitbanda serta Dinas Pertanian yang semuanya dinilai masih berada dikategori kurang.

*Kelima*, Prasetyo dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi dan pengembangan pelayanan program 3 in 1 dalam peningkatan kualitas pelayanan publik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi dari pelayanan program 3 in 1 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dispendukcapil Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan Pelaksanaan Pelayanan Program 3 In 1 pada Dispendukcapil Kota Batu telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengaksesnya secara online

Dari kelima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa konsep *E-Government* cukup banyak diterapkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan di wilayah Kota Batu. Penggunaan *e-goverment* menjadi suatu kebutuhan penting untuk menciptakan pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam penelitian Salwa (2020) *E-Government* dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai aplikasi demi mewujudkan smart city di Kota Batu yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 78 tahun 2017 tentang Master Plan Batu Smart city. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Andre Prasetyo (2020) dengan judul “Evaluasi

Implementasi dan pengembangan pelayanan program 3 in 1 dalam peningkatan kualitas pelayanan publik”. Penggunaan TIK pada aktivitas yang bersifat khusus seperti pada pelayanan program 3 In 1 di Dispendukcapil Kota Batu mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Meski dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik, Pengembangan TIK dalam rangka mewujudkan *E-Government*, sering kali terhambat oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya TIK dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Begitu juga dengan Penelitian Iradhad Taqwa Sihidi (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Smart City Melalui Batu Among Tani Teknologi (BATT) di Kota Batu”. dan Ronal Darma (2020), melakukan penelitian dengan judul ‘Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) dalam Pelayanan Publik di Desa Junrejo Kota Batu. Kendala utama dari kedua penelitian tersebut didominasi oleh kekurangan sumber daya manusia yang memadai dan kualitas jaringan komputer yang kurang baik. Kondisi ini disebabkan kelemahan dalam sistem itu sendiri yang berakibat kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah terkait

Penelitian mengenai evaluasi penerapan *E-Government* di Pemerintah Kota Batu pernah dilakukan oleh Ridho Fadhlurrahman, tahun 2018, melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan *E-Government* di Pemerintah Kota Batu menggunakan kerangka kerja pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGi). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa penilaian penerapan e-

Government dengan menggunakan kerangka PEGI di 3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memiliki nilai kurang seluruhnya.

Namun demikian, dari seluruh hasil penelitian yang telah disebutkan di atas (*review literatur*) belum pernah ditemukan penelitian yang membahas tentang Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online terutama di BPS Kota Batu.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *E-Government* melalui Sensus Penduduk Online ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan peneliti di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu



2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Penerapan *E-Government* dalam Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sarana untuk penerapan dari teori teori mengenai penerapan *E-Government* yang sudah pernah didapat di bangku perkuliahan serta dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-Governmnet* pada Sensus Penduduk Online menggunakan 3 elemen sukses penerapan e-governement (*Support, Capacity, Value*) di BPS Kota Batu.

- b. Bagi Pemerintah BPS Kota Batu

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan untuk instansi yang bersangkutan yaitu BPS Kota Batu mengenai Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online menggunakan elemen sukses *E-Government* (*Support, Capacity, Value*).

- c. Bagi Pembaca

Dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk memperluas wawasan di Bidang Administrasi Publik mengenai Penerapan *E-Government* Pada Sensus Penduduk Online diukur dengan elemen sukses *E-Government* (*Support, Capacity, Value*) di BPS Kota Batu.

## 2. Manfaat Teoritik

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terutama dalam bidang penerapan *E-Government* melalui sensus penduduk online.

### **E. Fokus Penelitian**

Spradley yang dikutip (dalam Sugiyono, 2013; 208) menyampaikan fokus penelitian adalah sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang berhubungan dengan situasi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memusatkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mengacu pada elemen keberhasilan penerapan *E-Government* dalam Indrajit (2016; 19) terhadap Sensus Penduduk Online yang terdiri dari :
  - a. *Support*
  - b. *Capacity*
  - c. *Value*
2. Memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Penerapan *E-Government* Pada Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu sebagai berikut :

##### 1. *Support/Dukungan*

Dukungan merupakan elemen utama dalam pelaksanaan *E-Government*. Dukungan pemerintah BPS Kota Batu dalam Sensus Penduduk Online belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya dukungan pemerintah terkait mengenai regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu. Terkait sosialisasi yang dilaksanakan juga belum dilaksanakan secara menyeluruh. Dikarenakan masih ada dari masyarakat yang belum paham terkait pelaksanaan Sensus tersebut.

##### 2. *Capacity/Kapasitas*

Kemampuan pemerintah dalam menerapkan Sensus Penduduk Online merupakan aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik, Anggaran yang disiapkan dalam penerapan Sensus Penduduk Online ini masih belum mencukupi begitu juga dengan sumber daya manusia nya yang masih belum sepenuhnya berpartisipasi karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan

yang cukup tentang cara menggunakan teknologi dan internet, terutama di kalangan lansia atau mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi

Namun demikian, untuk sumber daya infrastruktur saat Sensus Penduduk Online sudah sangat mendukung dan memadai BPS mengembangkan aplikasi khusus yaitu ICS. Aplikasi ini menyediakan akses web seminimal mungkin sesuai dengan kondisi spek paling rendah yang dimiliki oleh penduduk sehingga penduduk dapat dengan mudah untuk mengakses web Sensus Penduduk di ponsel mereka sendiri. Selain itu ada penambahan jaringan internet indibiz yang telah mencapai kecepatan 300 mbps sehingga meningkatkan kecepatan jaringan internet pada saat kegiatan Sensus Penduduk 2020

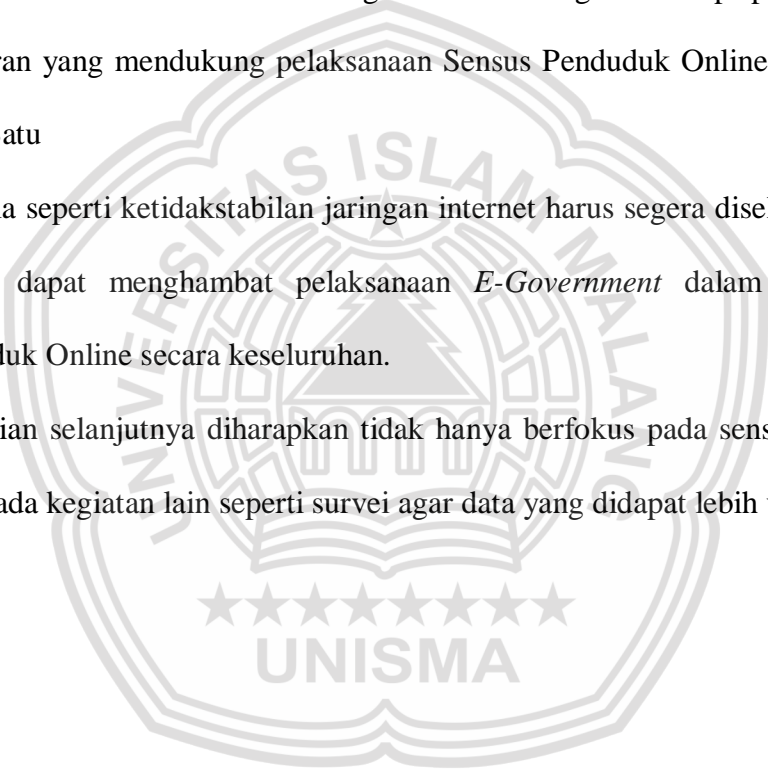
### 3. *Value/Manfaat*

Elemen terakhir adalah manfaat. Pelaksanaan *E-Government* sebaiknya dapat memberi manfaat bagi masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah. Manfaat yang diperoleh pemerintah setelah diterapkannya Sensus Penduduk Online bagi BPS adalah pengumpulan data sensus menjadi lebih cepat karena data sudah siap di BPS tanpa proses pencacahan. Akan tetapi penerapan Sensus Penduduk Online tidak memberi manfaat kepada pihak masyarakat

2. Faktor penghambat dalam penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk Online terdiri menjadi dua yaitu kesadaran masyarakat dan akses jaringan.
  - Faktor yang sangat mendukung dalam Penerapan *E-Government* pada Sensus Penduduk online terdiri dari dua yaitu ketersediaan IT dan Bonus Demografi.

## B. Saran

1. Diperlukan dukungan pemerintah yang kuat, terutama dalam penyediaan dana, agar penerapan pemerintahan elektronik (*E-Government*) bisa menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pelaksanaan Sensus Penduduk.
2. Pemerintah BPS Kota Batu harus segera membuat regulasi berupa peraturan peraturan yang mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk Online di BPS Kota Batu
3. Kendala seperti ketidakstabilan jaringan internet harus segera diselesaikan karena dapat menghambat pelaksanaan *E-Government* dalam Sensus Penduduk Online secara keseluruhan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada sensus saja, masih ada kegiatan lain seperti survei agar data yang didapat lebih update.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Alfabeta.
- Arikunto Suharsimi (2012). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Adi Mahasatya
- Fiantika, Feny Rita. et,al 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang : PT. Global Eksekutif Tinggi
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hariningsih, S. P. (2005). *Teknologi informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indrajit, R. E. (2006) *Elektronik Government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2005). *Electronic government in action ragam kasus implementasi sukses di berbagai belahan dunia*. 273.
- Indrayani, E. (2020). *E-Government : Konsep , Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia* (Issue March).
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nizammudin. 2020. *Penelitian Berbasis Tesis dan Skripsi*. Jakarta: Pantera Publisihing
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Zulhakim, A. A. (2012). *MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)*. Bengkulu: Deepublish

## Jurnal dan Skripsi

- Darma, Ronal. (2016). Penggunaan SIMADE dalam Pelayanan Publik di Desa Junrejo Kota Batu. *Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Fuadi, W. (2018). Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (Pegi). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Evaluasi Pemerintahan*, 3, 110. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/3482/1368> (diakses pada 20 Juni 2022)
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. In *Electronic Government* (Vol. 84). <https://www.academia.edu/30100450/>
- Indrayani, E. (2020). *E-Government* Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK *E-Government*). In *LPP Balai Insan Cendikia* (Issue February).
- Irawan, B. (2015). *E-Government* Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 200–209. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/419/379>
- Kominfo.go.id. (2019). *Sensus Penduduk 2020: Satu Indonesia, Satu Data Kependudukan*. Kominfo.Go.Id.. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/22947/sensus-penduduk-2020-satu-indonesia-satu-data-kependudukan/0/berita>
- Kumorotomo, W., & Mada, U. G. (2014). *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan tidak Produktif. Desember*.
- Prasetyo, A., Nur, D. Y., & Poetri, D. R. (2020). Evaluasi Implementasi dan Pengembangan Pelayanan Program 3 In 1 Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Dispendukcapil Kota Batu). *Prosiding Simposium Nasional 'Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4. O*, 1071–1095.
- Salwa, H., Sari, A. F., & Yulistiani, D. P. (2020). Pemanfaatan *E-Government* Untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik Di Kota Batu. *Universitas Muhamamadiyah Malang*, 374–398. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3501%0A>
- Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City Program Through Batu Among Tani Teknologi (BATT) in Batu City, Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 1.

<https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021>

Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi *E-Government* Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta*, 24 Mei, pp 99–108.

**Undang – Undang :**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun Tahun 1997

Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia

Buku Pedoman BPS Kota BATU

**Internet :**

Ananda, A. (2020). *Menakar Efisiensi Sensus Penduduk Online*. CNNIndonesia.Com.<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200218074504-92-475573/menakar-efisiensi-sensus-penduduk-online>

Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Batu*.<https://batukota.bps.go.id/pressrelease/2021/02/08/30/berita-resmi-statistik-hasil-sensus-penduduk-2020-kota-batu.html>

<https://batukota.go.id/Portal/profil>

